

**PERKEMBANGAN UMKM
(USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DI INDONESIA**

Yuli Rahmini Suci

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan
email: yulirahmini@ymail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berkaitan dengan pengembangan pertumbuhan UMKM di Indonesia. Beberapa literatur dirujuk untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dan penggunaan data sekunder diperoleh berasal dari dinas-dinas terkait seperti : BPS, BI dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Kelemahan yang dihadapi oleh UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai indikator yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain; kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir dan terbatasnya pemasaran. Disamping hal-hal terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi sempit dan terbatas. Kekawatiran ini dilandasi bahwa Indonesia akan menghadapi MEA dan pasar bebas. Ketiaka itu terlaksana tuntutananya adalah UMKM harus mampu bersaing. Namun semua permasalahan itu bisa terselesaikan dengan beberapa kebijakan yang membuka peluang bagi UMKM untuk dapat mengakses industri perbankan dengan mudah. Sebab pertumbuhan kredit yang dikucurkan sektor perbankan hanya 13,6%. Ini menunjukkan permasalahan yang bersumber dari permodalan dapat dengan mudah terselesaikan dan berimbang kepada pengelolaan dan produk yang dihasilkan akan lebih kompetitif. Tantangan MEA yang dikawatirkan oleh Pemerintah dapat dihadapi dengan lebih baik.

Kata Kunci : *UMKM, Perbankan, dan Pengembangan*

PENDAHULUAN

Krisis yang menimpa Indonesia tahun 1997 diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia yakni resesi ekonomi. Hal ini merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kembali mencermati suatu pembangunan ekonomi yang benar-benar memiliki struktur yang kuat dan dapat bertahan dalam situasi apapun (Anggraini dan Nasution, 2013:105).

Ketika krisis ekonomi menerpa dunia otomatis memperburuk kondisi ekonomi di Indonesia. Kondisi krisis terjadi periode tahun 1997 hingga 1998, hanya sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik merilis keadaan tersebut pasca krisis ekonomi jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat pertumbuhannya teruas, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta

tenaga kerja samapai tahun 2012. Pada tahun itu jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau sebesar 99,99%. Sisanya sekitar 0,01% atau sebesar 4.968 unit adalah Usaha bersekala besar. Fenomena ini menjelaskan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan bagi mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor yang lain bisa berkembang. Salah satu sektor yang terpengaruh dari pertumbuhan UMKM adalah sektor jasa perbankan yang ikut terpengaruh, sebab hampir 30% usaha UMKM menggunakan modal operasional dari perbankan.

Pengalaman tersebut telah menyadarkan banyak pihak, untuk memberikan porsi lebih besar terhadap bisnis skala mikro, kecil, dan menengah. Persoalan klasik seperti akses permodalan kepada lembaga keuangan pun mulai bisa teratasi.

Karena di dalam peraturan itu tercantum mengenai perluasan pendanaan dan fasilitasi oleh perbankan dan lembaga jasa keuangan non-bank (LPPI&BI,2015:1).

Semua keberhasilan yang telah dicapai oleh memiliki titik kelemahan yang harus segera diselesaikan untuk dicarikan solusi yang terbaik. Kelemahan yang dihadapi oleh para pengusaha UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai indikator yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain; kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir dan terbatasnya pemasaran. Disamping hal-hal terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi sempit dan terbatas. Kekawatiran ini dilandasi bahwa Indonesia akan menghadapi MEA dan pasar bebas. Ketika itu terlaksana tuntutannya adalah UMKM harus mampu bersaing.

Harapan Pemerintah ketika pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations yang dimulai pada akhir Tahun 2015 perlu dilakukan persiapan secara terintegrasi dan komprehensif, agar pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional.

KAJIAN TEORI

Beberapa peneliti telah banyak mengkaji dan berusaha memberikan masukan untuk pengembangan UMKM di Indonesia. Peneliti tersebut diantaranya dilakukan oleh Supriyanto(2006:1) menyimpulkan dalam penelitiannya ternyata UMKM mampu menjadi solusi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 30%. Upaya untuk memajukan dan

mengembangkan sektor UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Program Aksi Pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM yang telah dicanangkan Presiden Yudhoyono pada tanggal 26 Pebruari 2005, terdapat empat jenis kegiatan pokok yang akan dilakukan yaitu, (1) penumbuhan iklim usaha yang kondusif, (2) pengembangan sistem pendukung usaha, (3) pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, serta (4) pemberdayaan usaha skala mikro.

Sedangkan peneliti Saputro, dkk.(2010:140-145) melihat bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia telah banyak memberikan berkontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional sebesar 55.56% berdasarkan data Biro Perencanaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, pada tahun 2008. Untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing UKM, UKM membutuhkan suatu aplikasi yang dapat mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses bisnis UKM. Aplikasi ERP dapat menjadi salah satu solusi untuk UKM dikarenakan keuntungan yang dapat diberikan seperti memberikan informasi dengan waktu respon yang cepat, meningkatkan interaksi antar bagian dalam suatu organisasi, meningkatkan pengelolaan siklus pemesanan barang, dsb. Beberapa isu kritis yang dihadapi oleh UKM adalah terbatasnya dana dan kapabilitas teknologi informasi yang dimiliki. Dalam memahami kebutuhan layanan yang diperlukan oleh UKM untuk aplikasi ERP dan untuk menyediakan arahan bagi UKM serta menanggapi kurangnya riset ERP di Indonesia maka riset ini bertujuan untuk menggambarkan peta rencana jangka panjang dari agenda riset ERP yang akan dilakukan untuk UKM di Indonesia.

Kemudian peneliti Darwanto (2013:142-149) melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan UMKM dalam

perekonomian di Indonesia. UMKM sebagai bagian dari perekonomian juga harus lebih meningkatkan daya saing dengan melakukan inovasi. Keunggulan bersaing berbasis inovasi dan kreativitas harus lebih diutamakan karena mempunyai daya tahan dan jangka waktu lebih panjang. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi kelembagaan dalam mendorong inovasi dan kreativitas pelaku UMKM. Paper ini hasil pemikiran dengan penelitian pustaka dan menggunakan metode analisis SWOT. Selanjutnya tulisan ini melakukan komparasi strategi menciptakan kelembagaan yang kuat bagi penciptaan kreativitas dan seni yang mampu meningkatkan daya saing UMKM dari beberapa negara. Permasalahan UMKM terkait dengan produktivitas antara lain kurangnya perlindungan terhadap hak cipta atas inovasi dan kreativitas. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya penjiplakan pada suatu produk sehingga merugikan UMKM pencipta produk. Hak cipta (property right) terhadap produk atau desain produk tidak berfungsi sebagai insentif produksi. Property right yang diabaikan menciptakan disinsentif produksi. Oleh karena itu perlu ada insentif bagi pencipta produksi sehingga mereka tetap terdorong melakukan inovasi dan kreativitas secara terus menerus. Langkah yang dapat dilakukan adalah apresiasi dengan pemberian hak paten terhadap UMKM yang inovatif. Ini akan mendorong kreasi-kreasi lebih lanjut serta menghasilkan produk dengan fitur dan desain yang menarik konsumen.

Selanjutnya peneliti Putra dan Mustika (2014:549-557) melakukan pengamatan terhadap program yang digulirkan oleh pemerintah melalui lembaga Jamkrida. Jamkrida memberikan jaminan kredit bagi UMKM dalam upaya membantu permodalan untuk kelangsungan dan pengembangan usaha dimasa yang akan datang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas program Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) di Kabupaten Tabanan, untuk mengetahui dampak program Jamkrida terhadap pendapatan dan penyerapan tenaga kerja UMKM di Kabupaten Tabanan. Sampel

penelitian ditentukan dengan rumus Slovin sebanyak 76 UMKM. Alat analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis efektivitas dan uji beda, terdiri dari: uji normalitas dan uji Wilcoxon. Berdasarkan hasil pembahasan, maka didapat simpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: pelaksanaan program Jamkrida di Kabupaten Tabanan adalah sangat efektif, program Jamkrida berdampak positif terhadap pendapatan dan penyerapan tenaga kerja UMKM di Kabupaten Tabanan.

Hal yang senada juga dilakukan oleh peneliti Sholhuddin (2013: 496-500) dengan melihat peranserta pemerintah namun di sektor perbankan khususnya syariah dalam pengembangan produk jasanya bagi untuk membantu perkembangan UMKM. Perbankan syariah mengambil peranan strategis dalam meningkatkan usaha UMKM terutama dalam masalah pendanaan dan supporting dalam masalah pendampingan teknis and non teknis. Secara kualitatif memang perbankan syariah sudah melakukan berbagai strategi (1)inovasi strategi pembiayaan; (2)Program Linkage; (3)Pilot project; (4) Pemanfaatan dana sosial; (5)kerjasama technical assistance. Namun secara kuantitatif ternyata peran perbankan syariah terhadap UMKM masih belum memuaskan. Banyak pihak mempunyai ekspektasi terlalu besar terhadap peran perbankan syariah terhadap UMKM. Padahal sistem keuangan syariah nasional mempunyai permasalahan fundamental yang menyebabkan berbagai pihak terkait mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan fungsi syariah sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Tantangan utama lembaga keuangan syariah adalah menyelesaikan permasalahan fundamental tersebut yang terdiri dari kerangka sistem yang berbasis pada bunga, ketidakstabilan standar mata uang dan pola pikir permissive akibat lingkungan kehidupan kapitalistik.

Berdasarkan penelitian yang telah dikaji dan dikembangkan oleh para peneliti maka kelemahan yang dihadapi oleh para UMKM rasanya segera bisa diatasi. Kelemahan itu mulai dari kurangnya

permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir dan terbatasnya pemasaran. Sebab kunci utama dari kelemahan UMKM adalah kesungguhan dan peran serta Pemerintah dalam mengelola UMKM yang ada di Indonesia.

a. Pengertian UMKM

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

b. Keterian UMKM

Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kreteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - i. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - ii. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - i. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

- usaha; atau
 - ii. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- i. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - ii. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

c. Kebijakan Pemerintah

UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Berdasarkan kenyataan ini sudah selayaknya UMKM dilindungi dengan UU dan peraturan yang terkait dalam kegiatan oprasional dan pengembangannya. Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM diantaranya UUD 1945 merupakan pondasi dasar hukum di indonesia Pasal 5 ayat(1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, UU No.9 Tahun 1995, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang

mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan, Peraturan Presiden No.5 Tahun 2007 mengenai program Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan oprasional UMKM, UU No.20 Tahun 2008 tentang perberdayaan UMKM bagi prekonomian di Indonesia, dan yang terbaru adalah Paket 4 Kebijakan Ekonomi “kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas” bagi UMKM. Paket ini dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari Kamis, 15 Oktober 2015, pukul 20:32 (<https://www.ekon.go.id/berita/view/paket-kebijakan-ekonomi-paket.1751.html>).

Harap Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ini merupakan intrumen dalam menyikapi kebutuhan bagi pengembangan UMKM. Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan kredit perbankan cenderung melambat dalam satu tahun terakhir. Pada pertengahan tahun 2014, pertumbuhan tahunan kredit masih sebesar 16,65% yang selanjutnya turun menjadi 11,6% pada akhir tahun 2014 dan 10,4% pada akhir semester I 2015. Kecenderungan tersebut juga terjadi pada kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang hanya tumbuh sebesar 9,2% (*year on year*) pada akhir Juni 2015. Kecenderungan perlambatan penyaluran kredit tentu saja terkait dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, untuk mendorong gerak roda ekonomi masyarakat khususnya kepada UMKM, pemerintah memberikan subsidi bunga yang lebih besar bagi KUR.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berkaitan dengan tema UMKM hanya mendiskripsikan dan permasalahan melalui solusi studi literature yang terkait yang telah terjadi di Indonesia. Data skunder yang digunakan berasal dari dinas-dinas terkait seperti : BPS,BI dan Kementrian Koperasi dan UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor UMKM kemampuan yang handal dan mumpuni serta memiliki peranan penting dalam kancah

perekonomian Nasional. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingga, ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis.

Kemandirian UMKM bisa terlihat berdasarkan data industri perbankan yang menunjukkan pertumbuhan kredit UMKM hanya rata-rata mencapai 13,67% pertahun. Pemberian kredit masih didominasi oleh Bank Umum Nasional, yang memang telah diinstruksikan oleh Pemerintah untuk lebih memperhatikan UMKM melalui instrumen kebijakan ekonomi "Paket 4".

Tabel.1 Penyaluran Kredit UMKM Tahun 2014

Keterangan	Pertumbuhan (%)
Bank Umum BUMN Nasional	57 %
Bank Umum Swasta Nasional	40%
Bank Asing	3%

Sumber: data BI, 2015

Disatu sisi berdasarkan data tabel 1 kita optimis bahwa UMKM akan tetap mampu tumbuh dan berkembang namun dilain sisi jika diperhatikan lebih seksama maka kelamahan UMKM adalah tidak akan bisa mengembangkan usahanya jika tidak mendapatkan kucuran bantuan modal dalam berkompetisi, maka kelemahan ini seperti kurangnya permodalan, kemampuan manajerial persaingan yang kurang sehat mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas sulit dalam jangka pendek terselasaikan walaupun pemerintah mengerahkan kebijakan-kebijakan dalam mendukung UMKM.

Kemudian, selama tahun 2011 hingga tahun 2012 terjadi fluktuasi pertumbuhan UMKM. Tabel 2 berikut dapat menjadi gambaran bagaimana peningkatan UMKM di Indoneisa.

Tabel 2 Perkembangan UMKM dan Usaha Besar Nasional di Indonesia Tahun 2011-2012

Keterangan	2011	2012
Usaha Besar	41,95%	40,92%
Usaha Menengah	13,46%	13,59%
Usaha Kecil	9,94	9,68%
Usaha Mikro	34,64	38,81%

Sumber: Kementrian Koperasi dan UMKM, 2014

Berdasarkan tabel 2 pada priode tahun 2011, usaha besar mencapai sebesar 41,95%, kemudian di priode tahun berikutnya hanya sebesar 40,92%, turun sekitar 1,03%. Disektor UMKM terjadi sebaliknya. Usaha menengah pada priode tahun 2011 dari 13,46%, meningkat pada priode tahun 2012 mencapai sebesar 13,59%. Ada pertumbuhan sebesar 0,13%. Namun terjadi berbeda di usaha kecil, ada sedikit penurunan 0,26% dari priode tahun 2011 sebesar 9,94% ke priode tahun 2012 sebesar 9,68%. Peningkatan cukup besar terjadi pada usaha mikro, di priode tahun 2011 hanya mencapai sebesar 34,64%, pada priode tahun 2012 berhasil meraih tumbuh sebesar 4,17% atau sebesar 38,81%.

Selanjutnya, data pertumbuhan UMKM dalam menyumbang terhadap PDB dan nilai ekspor di Indonesia tersajikan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3 Perkembangan UMKM terhadap Sumbangan PDB dan Nilai Ekpor Tahun 2011-2013

Keterangan	2011	2012	2013
Sumbangan			
gan PDB(harga	1.369.3	1.452.4	1.536.9
ga	20,00	60,20	18,80
kostan) dalam Miliar			
Pertumbuhan	6,76%	6%	5,89%

sumbang an PDB Nilai			
Ekspor(d alam Miliar)	187.441 ,82	166.626 ,50	182.112 ,70
Pertumb uhan Nilai Ekspor	6,56%	-11,10%	9,29%

Sumber: BPS Indonesia dalam angka,2016

Berdasarkan tabel 3 menggambarkan bahwa UMKM menyumbangkan PDB dari tahun 2011 hingga tahun 2013 mengalami flutuatif naik turun peningkatan. Pada priode 2011 pertumbuhan PDB nya sebesar 6,76% namun ditahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,76% atau sebesar 6% dari total PDB Nasional. Pada priode 2013 ada peningkatan sebesar 0,3 dari priode tahun sebelumnya atau sebesar 6,03%. Selanjutnya, pertumbuhan nilai ekspor ditahun 2013 mengalami angka pertumbuhan berarti bagi pembentuk PDB Nasional yaitu sebesar 9,29% lebih baik dari pada priode tahun sebelumnya yang mengalami minus -11,10%. Melihat fenomena data yang dirilis oleh BPS tahun 2016 ini menunjukkan bahwa UMKM harus terus dibina demi meningkatkan pertumbuhan bagi PDB secara keseluruhan bagi Nasional.

Pemberian pelatihan mulai dari pengelolaan manajemen keuangan hingga pemasaran ke *market* bagi UMKM merupakan tugas yang berat dijalankan oleh Pemerintah. Peran nyata yang telah dilakukan UMKM bisa tergambarkan dari data-data tabel 2 dan tabel 3 seperti nilai ekspor yang diperankan oleh UMKM mencapai 9,29 merupakan prestasi yang tidak gampang di kerjakan oleh sebuah usaha. Kedepanya Indonesia dapat menatap tantangan MEA dengan baik dan mampu berkompetisi secara profesional serta mampu mewarnai prekonomian Nasional dengan lebih baik.

KESIMPULAN

Semua keberhasilan yang telah dicapai oleh UMKM memiliki titik kelemahan yang harus segera diselesaikan

meliputi kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan minimnya keterampilan pengoperasi dalam mengorganisir dan terbatasnya pemasaran merupakan hal yang mendasar selalu dihadapi oleh semua UMKM dalam merintis sebuah usaha bisnis untuk dapat berkembang. Persaingan bisnis yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi sempit dan terbatas merupakan faktor tambahan yang merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh semua pihak khususnya Pemerintah sebagai pemangku kepentingan secara lokal dan nasional. Berdsarkan data pertumbuhan yang telah dicapai oleh UMKM bahwa pada priode 2013 nilai ekspor mengalami peningkatan sebesar 9,29% atau senilai Rp.182 miliar. Ini merupakan keberhasilan yang harus dibangkan bagi UMKM yang hampir sebesar 86.33% bermodalkan kemandirian. Industri perbankan baru mengucurkan kredit hanya sebesar 13,67% namun itu masih didominasi oleh perbankan umum nasional. Ini menunjukkan bahwa masih terbuka peluang lebar kesempatan untuk mengembangkan UMKM kedepannya. Kebijakan ekonomi “Paket 4 “ merupakan celah bisa menjadi solusi bagi UMKM untuk bisa mempermudah mengembangkan usaha lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Dewi dan Nasution, Syahrir Hakim. 2013.Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol.1.No(3).Hal:105-116.
- BPS Indonesia dalam angka, 2016 (<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1322>) (diakses 23/1/2017)
- Darwanto. 2013.Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Inovasi Dan Kreativitas(Strategi Penguatan Property Right Terhadap Inovasi Dan Kreativitas).Jurnal Bisnis dan

- Ekonomi(JBE).Vol.20.No(2).Hal:142-149.
<http://www.depkop.go.id> (diakses 22/1/2017)
- LPPI dan BI.2015.Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Mengengah (UMKM).Hal:1-100.<http://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf> (diakses 22/1/2017).
- Paket 4 Kebijakan Ekonomi Pembangunan <https://www.ekon.go.id/berita/view/paket-kebijakan-ekonomi-paket.1751.html> (diakses 22/1/2017).
- Putra, Gede Surya Prtama., dan Mustika, Made Dwi Setyadi. 2014. Efektivitas Program Jamkrida Dan Dampak Terhadap Pendapatan Dan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM.E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana.Vol.3.No(12)Hal:549-557.
- Saputro.J.W., Handayani, Putu Wuri., Hidayanto, Achmad Nizar., dan Budi, Indra.2010.Peta Rencana (ROADMAP) Riset Enterprise Resource Planning (ERP) Dengan Fokus Riset Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UMK) Di Indonesia.Journal of Information Systems.Vol.6.No(2).Hal:140-145.
- Sholhuddin, Muhammad. 2013. Tantangan Perbankan Syariah Dalam Perannya Mengembangkan UMKM. Proceeding Seminar Nasional Dan Call For Paper Sancall.Surakarta.Hal:496-500.
- Supriyanto.2006.Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah(UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan.Jurnal Ekonomi Pendidikan.Vol.3.No(1).Hal:1-16.
- Undang-Undang No.20 Pasal 1 dan Pasal 6 Tahun 2008 <http://www.hukumonline.com/pusadata/download/fl56041/node/28029>(diakses 22/1/2017).